



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN

Jalan M.H. Thamrin Nomor 6 Jakarta 10340
Telepon (021) 31924509, 31930585, 3920774, 3920739, 3920791, Pstl. 465, 466, 234, 467
Telepon Langsung/Fax. : (021) 3812583, 3846832, 3920626, 3920628 Trolol Pos 3590
Website : <https://www.bimaskristen.kemenag.go.id>, Email : bimaskristen.kemenag.go.id

Nomor : B- /AJ.N/DIN.II/PP.00.6/11/2018
Lamp : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Nomor Pokok Sekolah Nasional
(NPSN)

12 Nopember 2018

Kepada Yth :
Kepala Pusat Data dan Statistik Pendidikan (PDSP)
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
Gedung E Lantai 1 - Kompleks Kemdikbud
Jl. Jend. Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Bersama surat ini kami kirimkan kepada Saudara daftar Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) yang sudah mendapat Ijin Penyelenggaraan dari Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama, untuk berkenan menerbitkan Nomor Pokok Sekolah Nasional (Daftar SMTK terlampir).

Demikianlah permohonan kami, atas kerjasama Saudara diucapkan terimakasih.

A.n. Direktur Pendidikan Kristen,
Kasubid Pendidikan Menengah



Tembusan :
1. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Jakarta;

PENGALUAN NPSN SEKOLAH MENENGAH AGAMA KRISTEN (SMAK) DAN SMTK TAHUN 2018

No.	NAMA KEPALA SEKOLAH	NAMA SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH	JENJANG	NAMA PROVINSI	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA/KEL	SK PENYELENGGARAAN		
									PEJABAT	NO SK	TANGGAL SK
1.	Heri Mangadil, M.Pd	SMAK Makedonia	Desa Lelief Sawai Kecamatan Weda Tengah	Menengah	Maluku Utara	Halmahera Tengah	Weda Tengah	Lelief Sawai	DBK	447	29/10/2018


 Lelief, 29 September 2018
 Kasubdit
 Polaris Telambanua
 NIP-198310251985031003

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA RI**

NOMOR : 447 TAHUN 2018

T E N T A N G

**IJIN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH MENENGAH AGAMA KRISTEN (SMAK) MAKEDONIA
KECAMATAN WEDA TENGAH, KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
PROPINSI MALUKU UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN**

- Menimbang** :
- a. bahwa Lembaga Pendidikan Keagamaan Kristen Tingkat Menengah merupakan jenjang pendidikan yang integral dalam Sistem Pendidikan Nasional sebagai salah satu komponen untuk mencaerdaskan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Kristen, telah diadakan visitasi dan uji petik kelayakan Ijin Penyelenggaraan terhadap Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK) Makedonia, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah Propinsi Maluku Utara;
 - c. bahwa Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK) Makedonia, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah Propinsi Maluku Utara pada huruf (b) di atas telah memenuhi persyaratan dan layak diberikan Ijin Penyelenggaraan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a) dan (b) dan (c) diatas, perlu ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama tentang Ijin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK) Makedonia, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah Propinsi Maluku Utara.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2005; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pencanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 953);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 607);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 955);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Kristen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen;
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1945).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA RI, TENTANG IJIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH AGAMA KRISTEN (SMAK) MAKEDONIA KECAMATAN WEDA TENGAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH PROPINSI MALUKU UTARA**
- KESATU :** Memberikan Ijin Penyelenggaraan pada Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK) Makedonia, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah Propinsi Maluku Utara.
- KEDUA :** Dengan diberikannya Ijin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK) Makedonia, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah Propinsi Maluku Utara, maka dalam menyelenggarakan proses pendidikannya harus memperhatikan dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA :** Ijin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK) Makedonia, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah Propinsi Maluku Utara, akan ditinjau kembali selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditetapkan.
- KEEMPAT :** Setiap akhir semester Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK) Makedonia, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah Propinsi Maluku Utara, diwajibkan memberikan laporan secara tertulis tentang keadaan dan perkembangannya kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI di Jakarta.
- KELIMA :** Apabila Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK) Makedonia, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah Propinsi Maluku Utara lalai melaksanakan diktum 4 (empat) diatas dapat mengakibatkan dicabutnya Ijin Penyelenggaraan.
- KEENAM :** Setelah ditetapkan Ijin Penyelenggaraan dan telah mengikuti Ujian Nasional, Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK) Makedonia, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah Propinsi Maluku Utara diwajibkan menindaklanjuti Ijin Penyelenggaraan ini untuk proses akreditasi atau reakreditasi ke Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M).
- KETUJUH :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 29 Oktober 2018

